

## Analisis Dana Dekonsentrasi Sektor Pendidikan Di Provinsi Sumatera Barat

**Gerry Hamdani Putra**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

[gerryhamdaniputra@akbpstie.ac.id](mailto:gerryhamdaniputra@akbpstie.ac.id)

### ABSTRACT

*This research had a purpose to analyze deconcentration fund of education field in West Sumatera Province on 2011-2015. The type of analysis used is descriptive quantitative by collecting and analyzing the data of allocated deconcentration fund, Report on Budget Outcomes (RBO), Strategic Plan of Education Ministry, Accountability Report of Government's Performance, program implementation, and relation with government in educational field. The result of the research showed that there are activities that were not accordance with the nature of deconcentration fund which is non-physical activity, such as in 2011 and 2012 there were still many physical activities such as building construction, laboratory equipment procurement, and rehabilitation of classroom and building of education office. The absorption of deconcentration fund would give a better affects for performance of education offices of West Sumatera Province. This could be seen from the total absorption of deconcentration funds that can increase the percentage of APK and APM which became the main indicator of the main programs in achieving performance.*

**Keyword:** Deconcentration, RENSTRA, LAKIP, APK and APM

---

*Detail Artikel:*

*Disubmit : 27 Maret 2021*

*Disetujui : 26 April 2021*

*DOI:10.31575/jp.v4i3.306*

---

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dana dekonsentrasi dikeluarkan oleh pemerintah pusat namun semua kegiatan tidak dilakukan oleh pemerintah pusat. Kewenangan pengaturan dan pengelolaan semuanya dilimpahkan kepada pemerintah

daerah Provinsi Sumatera Barat yang sepenuhnya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang menangani tentang bidang pendidikan. Namun untuk semua kegiatan tentang pelaporan dana dekonsentrasi tetap dilaporkan pemerintah pusat untuk mengetahui perkembangan apa yang sudah terjadi pada daerah (Kusuma, 2017).

Pelaksanaan dana dekonsentrasi secara rinci diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada pasal 1 menjelaskan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya (Runtuwene, 2019).

Menurut Permana & Purwanti, (2013) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang pejabat tingkat pusat kepada pejabat di wilayah negara. Oleh karena itu, di daerah terdapat suatu wilayah yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima sebagian wewenang dari pejabat pusat. Dana dekonsentrasi digunakan untuk melaksanakan program-program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Penyerapan dari dana dekonsentrasi juga dapat dilihat dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015, dan hasilnya dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Yang mana hal tersebut disusun berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJMD Sumatera Barat tahun 2010-2015. Renstra ini disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam priode 2010-2015 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pendidikan hingga saat ini.

Disini terdapat suatu hal yang dilematis, dimana disatu pihak pemerintah telah berupaya untuk memajukan bidang pendidikan, karena sektor pendidikan itu merupakan sektor yang paling strategis terhadap sektor ekonomi, dan sektor lainnya, dan dilain pihak masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan dan penerapannya.

### **Pengembangan hipotesis**

Menurut Armawaddina, (2017) Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Fatimah, (2019) daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Oktafia, (2018), ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut: Pertama: *Polical Equality*: yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Kedua *Local Accountability* yaitu : meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat didaerah.

Ketiga yaitu: *Local responsiveness* yaitu: meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah-masalah social ekonomi yang terjadi didaerahnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif serta pendekatan kualitatif untuk memperoleh hasil empiris. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Menurut Ramadani, (2017) penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta karakteristik objek/subjek yang diteliti secara tepat.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja bidang pendidikan tahun 2011-2015, dimana terdapat alokasi dana dekonsentrasi beserta program dan kegiatan yang dilakukan. Selain itu, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), RENSTRA Kemendiknas 2010-2015 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Provinsi Sumatra Barat juga digunakan sebagai data tambahan untuk memperkuat penelitian ini.

### **Data dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data keuangan Laporan Realisasi Anggaran Belanja provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai 2015.

Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui:

#### 1. Metode Dokumentasi

Metode ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang berupa data :

- Laporan Realisasi Anggaran Belanja provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011-2015
- Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Provinsi Sumatra Barat
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015
- Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2015
- Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah (RPDP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 Bidang Pendidikan Nasional

#### 2. Metode Studi Pustaka

Metode ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan melalui

literatur, jurnal, dan informasi *online*.

### 3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan informan yang menjadi narasumber. Informan yang dimaksud yaitu yang memungkinkan peneliti memperoleh data berupa informasi yang memadai tentang tujuan penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung terhadap 3 orang informan yang terdiri dari Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Program dan Kasubag Keuangan pada SKPD terpilih yaitu SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sumatera Barat.

### Teknik Analisis Data

Analisis data ini akan dilakukan secara Deskriptif, yakni menggambarkan temuan apa adanya. Dari penemuan secara *induktif*, yakni penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dari yang berbentuk khusus ke bentuk umum (*Deduktif*), kemudian dilakukan penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai semua unsur-unsur penelitian yang ada dalam alokasi dana dekonsentrasi.

## PEMBAHASAN

### Alokasi Dana Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan Nasional

Dana dekonsentrasi Departemen Pendidikan Nasional diberikan kepada pemerintah provinsi untuk membiayai pelaksanaan kewenangan pusat yang dijalankan oleh pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan, termasuk kegiatan evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan pengembangan kapasitas.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan, seperti yang direncanakan dalam Rencana Strategis tahun 2010-2015 Kementerian Pendidikan nasional, dibuat skenario pendidikan yang dapat menjelaskan target dan sasaran yang harus dicapai melalui indikator kinerja masing-masing program.

**Tabel 1**  
**Target/sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK)**

No.	Indikator Kinerja	Kodisi	Target/Sasaran (%)				
		Awal 2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	APK SD/MI/Paket A provinsi	110,6 %	118,4	119,4	120,4	121,9	122,1
2.	APK SMP/MTs/Paket B provinsi	80,34 %	98,92	100,4	101,9	103,4	104,9
3.	APK SM provinsi	72,51%	84,33	84,75	85,16	85,58	86,00

Sumber data: RENSTRA Kemendiknas 2010-2015

**Tabel 2**  
**Angka Partisipasi Murni (APM)**

No.	Indikator Kinerja	Kodisi Awal		Target/Sasaran (%)			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	APM SD/MI/Paket A provinsi	95,51 %	99,86	99,90	99,94	99,97	100
2.	APM SMP/MTs/Paket B Provinsi	68,22 %	78,80	80,35	82,90	83,45	85,00
3.	APM SM provinsi	55,50 %	62,50	67,50	72,50	75,00	80,00

Sumber data: RENSTRA Kemendiknas 2010-2015

Menurut Nugraha & Amelia, (2018) Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk melaksanakan pendidikan. APK merupakan indikator untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan(Maha.).

Menurut Nugraha & Amelia, (2018) Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

### **Kesesuaian Alokasi Dana Dekonsentrasi terhadap program dan kegiatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat**

Namun dikaitkan dengan tujuan pengalokasian dana dekon dalam Renstra (2010-2015) Kementerian Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Dana dekonsentrasi Kementerian Pendidikan Nasional diberikan kepada pemerintah provinsi untuk membiayai pelaksanaan kewenangan pusat yang dijalankan oleh pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan, termasuk kegiatan evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan pengembangan kapasitas dan bersifat non fisik, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana dekonsentrasi harus sesuai dengan peruntukan dana dekonsentrasi yang ditetapkan dalam Renstra Kemdiknas tersebut

(Basri, 2019).

Berdasarkan landasan tersebut, dapat dilihat gambaran program dan kegiatan yang dilakukan pada dinas pendidikan provinsi yang menggunakan alokasi dana dekonsentrasi yang sesuai dengan peruntukan dan ditetapkan dalam Renstra Kemdiknas.

**Tabel 3**  
**Alokasi Program/Kegiatan Dana Dekonsentras (dalam jutaan rupiah)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					Ket.
		2011	2012	2013	2014	2015	
<b>080015</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<i>350.274</i>	<i>165.195</i>	<i>13.197</i>	<i>56.142</i>	<i>28.053</i>	
<i>10.02.01</i>	<i>Wajar Dikdas 9 Tahun</i>	<i>251.430</i>	<i>104.241</i>	<i>7.537</i>	<i>51.641</i>	<i>17.983</i>	Sesuai
<b>0079</b>	<b>Pembangunan Gedung</b>	1.174	1.965				Tidak Sesuai
<b>0108</b>	<b>Pengadaan Peralatan Laboratorium</b>	542					Tidak Sesuai
<b>2321</b>	<b>Desentralisasi Peningkatan Pendidikan Dasar (ADB)</b>			785	4.347	6.320	Sesuai
<b>2323</b>	<b>Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>	306	1.358				Tidak Sesuai
<b>2325</b>	<b>Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP</b>	113.111	49.370	3.517	16.486	10.103	Sesuai
<b>2331</b>	<b>Perluasan dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar</b>	94.756	44.187	1.917	27.723	412	Sesuai
<b>2336</b>	<b>Perluasan dan Peningkatan Mutu PK dan PLK (Tingkat Dasar)</b>	23.537	7.359	1.316	1.743	1.118	Sesuai
<b>2582</b>	<b>Pembangunan SD- SMP Satu Atap</b>	429					Tidak Sesuai
<b>2589</b>	<b>Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SMP</b>						Sesuai

2590	<b>Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang Pendidikan Dasar</b>	17.571			1.340	28	Sesuai
<b>10.03.01</b>	<b><i>Pendidikan Menengah</i></b>	<b>97.620</b>	<b>59.914</b>	<b>4.732</b>	<b>3.984</b>	<b>3.117</b>	Sesuai
2356	<b>Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA</b>	49.007	10.709	2.147	1.967	1.589	Sesuai
2358	<b>Perencanaan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK</b>	43.731	12.428	2.585	2.016	1.587	Sesuai
2585	<b>Beasiswa untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah</b>	841	11.919				Sesuai
2586	<b>Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Menengah</b>						Tidak Sesuai
2594	<b>Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA</b>		16.858				Sesuai
2595	<b>Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK</b>		7.998				Sesuai
3400	<b>Pembangunan Gedung Pendidikan</b>	4.041					Tidak Sesuai
<b>10.07.03</b>	<b><i>Manajemen Pelayanan Pendidikan</i></b>	<b>1.223</b>	<b>1.038</b>	<b>927</b>	<b>516</b>	<b>251</b>	Sesuai
2563	<b>Perencanaan dan Pengendalian Dikdasmen</b>	1.223	1.038	927	516	251	Sesuai

---

Sumber data: LRAB Provinsi, RENSTRA Kemendiknas 2010-2015 setelah diolah

**Tabel 4**  
**Persentase Peruntukan Alokasi Dana Dekonsentrasi (ribuan rupiah)**

Tahun	Keterangan			
	Sesuai	%	Tidak Sesuai	%
2011	343.780.114	98,1	6.494.498	1,9
2012	153.872.621	93,2	11.322.650	6,8
2013	13.197.018	100	-	-
2014	56.142.398	100	-	-
2015	28.053.968	100	-	-

Sumber data: LRAB Provinsi, RENSTRA Kemendiknas 2010-2015 setelah diolah

Dilihat dari sifat kegiatan dana dekonsentrasi yang non fisik, antara lain berupa: koordinasi, perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, maka pelaksanaan kegiatan alokasi dana dekonsentrasi belum sesuai dengan ketentuan mengenai sifat pendanaan dekonsentrasi. Hal tersebut karena dalam kegiatan dengan alokasi dana dekonsentrasi pada tahun 2011 dan 2012 masih terdapat kegiatan fisik seperti pembangunan gedung, pengadaan peralatan laboratorium, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan SD-SMP satu atap, rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan gedung pendidikan yang masih terdapat pada kegiatan di lingkungan dinas pendidikan.

Program dan kegiatan yang harus sesuai dengan sifat dana dekonsentrasi yang non fisik mestinya harus sesuai dengan target yang ditetapkan dari RENSTRA Kemendiknas yang alokasinya harus di atas 90% untuk alokasi non fisik dan 10% untuk kegiatan penunjang yang bersifat fisik.

#### **Penyerapan Dana Dekonsentrasi Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat**

Menurut Dewi, (2015) Total anggaran untuk dana dekonsentrasi berbeda setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya faktor perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan kementerian pendidikan atas evaluasi program dan kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi landasan atas penyesuaian kembali setiap kegiatan-kegiatan pada program Dikdas, Dikmen, dan Manajemen pelayanan pendidikan.

Realisasi penyerapan dana dekonsentrasi pada dinas pendidikan provinsi sumatera barat dapat dilihat pada lampiran berikut:



**Tabel 5**  
**Realisasi Penyerapan Dana Dekonsentrasi (dalam jutaan rupiah)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>080015</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<i>325.179</i>	<i>153.880</i>	<i>12.507</i>	<i>53.848</i>	<i>26.373</i>
<i>10.02.01</i>	<i>Wajar Dikdas 9 Tahun</i>	<i>239.155</i>	<i>94.560</i>	<i>7.207</i>	<i>49.678</i>	<i>16.882</i>
<b>0079</b>	<b>Pembangunan Gedung</b>	981	1.944			
<b>0108</b>	<b>Pengadaan Peralatan Laboratorium</b>	542				
<b>2321</b>	<b>Desentralisasi Peningkatan Pendidikan Dasar (ADB)</b>			774	4.322	6.059
<b>2323</b>	<b>Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>	305	1.305			
<b>2325</b>	<b>Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP</b>	107.003	44.519	3.474	15.945	9.304
<b>2331</b>	<b>Perluasan dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar</b>	88.850	39.624	1.788	26.474	373
<b>2336</b>	<b>Perluasan dan Peningkatan Mutu PK dan PLK (Tingkat Dasar)</b>	23.492	7.166	1.170	1.639	1.116
<b>2582</b>	<b>Pembangunan SD-SMP Satu Atap</b>	411				
<b>2589</b>	<b>Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SMP</b>					

2590	<b>Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang Pendidikan Dasar</b>	17.567			1.296	28
<b>10.03.01</b>	<b><i>Pendidikan Menengah</i></b>	<b>84.889</b>	<b>58.289</b>	<b>4.377</b>	<b>3.668</b>	<b>2.770</b>
2356	<b>Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA</b>	42.618	10.103	2.116	1.776	1.235
2358	<b>Perencanaan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK</b>	37.414	11.760	2.260	1.891	1.535
2585	<b>Beasiswa untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah</b>	841	11.919			
2586	<b>Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah</b>					
2594	<b>Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA</b>		16.525			
2595	<b>Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK</b>		7.980			
3400	<b>Pembangunan Gedung Pendidikan</b>	4.016				
<b>10.07.03</b>	<b><i>Manajemen Pelayanan Pendidikan</i></b>	<b>1.134</b>	<b>1.030</b>	<b>923</b>	<b>501</b>	<b>243</b>
2563	<b>Perencanaan dan Pengendalian Dikdasmen</b>	1.134	1.030	923	501	243

Sumber data: LRAB Provinsi, RENSTRA Kemendiknas 2010-2015

Realisasi penyerapan dana dekonsentrasi berbeda tiap tahunnya, yang mana harus sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas utama oleh pemerintah.

Berikut tabel persentase penyerapan dana dekonsentrasi bidang pendidikan pada provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan realisasinya terhadap program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah provinsi.

**Tabel 6**  
**Persentase Penyerapan Dana Dekonsentrasi Bidang Pendidikan**  
**Provinsi Sumatera Barat (dalam ribuan rupiah)**

Tahun	Alokasi	Realisasi	%
2011	350.274.612	325.179.703	92.84%
2012	165.195.271	153.880.026	93.15%
2013	13.197.018	12.507.950	95.35%
2014	56.142.398	53.848.282	95.92%
2015	28.053.968	26.373.454	94.01%

Sumber data: LRAB, DITJEN Mandikdasmen Provinsi setelah diolah

Penyerapan dana dekonsentrasi secara umum menunjukkan hasil yang baik, walaupun alokasi untuk dana dekonsentrasi tersebut ada yang berkurang yaitu pada tahun 2011, 2012, 2013, sedangkan untuk tahun 2014 mengalami kenaikan alokasi dana dekonsentrasi ke Provinsi Sumatera Barat dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2015. Hal tersebut tidak begitu berpengaruh kepada kinerja instansi karena melihat penyerapan dana dekonsentrasi pada 2011-2014 terus mengalami kenaikan dan selalu di atas 90%, sedangkan untuk tahun 2015 mengalami penurunan 1,91% yaitu 94,01%.

Peningkatan penyerapan alokasi dana dekonsentrasi tersebut juga sejalan dengan naiknya kinerja dinas pendidikan provinsi di Sumatera Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja dinas pendidikan provinsi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015.

Indikator kinerja dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Capaian Angka Partisipasi Kasar dan Murni**

NO.	REALISASI INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Meningkatnya APK SD/MI/Paket A	%	111,91	111,94	115,58	116,42	116,48
2.	Meningkatnya APMSD/MI/Paket A	%	94,46	94,49	99,54	96,56	99,57

3.	Meningkatnya APK SMP/MTs/Paket B	%	92,96	93,51	103,52	104,76	105,01
4.	Meningkatnya APM SMP/MTs/ Paket B	%	75,43	80,90	80,75	81,12	81,15
5.	Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C	%	67,42	86,75	95,30	96,64	96,65
6.	Meningkatnya APM SMA/SMK/ MA/Paket C	%	50,34	69,67	71,96	73,08	73,10

Sumber data: LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi setelah diolah

Dari data yang terdapat pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. APK dan APM SD/MI/SDLB/Paket A

Capaian Indikator Kinerja APK SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2015 bila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2011 APK SD/MI/SDLB/Paket A baru mencapai 111,91% dan meningkat 0,03% pada tahun 2012.

Pada tahun 2013 APK SD/MI/SDLB/Paket A mencapai 115,58% lebih rendah 0,84% dari tahun 2014 yang mencapai 116,42%. Pada tahun 2015 APK SD/MI/SDLB/Paket A mencapai 116, 48%. Angka ini melampaui pencapaian target APK SD/MI/SDLB/Paket A Nasional sebesar 115,88%. Begitu juga dengan capaian Indikator Kinerja APM SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2015 bila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2011 baru mencapai 94,46% dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 94,49%. Pada tahun 2013 APM SD/MI/SDLB/Paket A mencapai 99,54% dengan kenaikan 5,05%. Penurunan terjadi pada tahun 2014 sekitar 2,98% dari tahun sebelumnya 96,56%. Pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 99,57%. Angka ini melampaui pencapaian target APM SD/MI/SDLB/Paket A nasional sebesar 95,71 %.

2. APK dan APM SMP/MTs/SMPLB/paket B

Capaian Indikator Kinerja APK SMP/MTs/SMPLB/paket B tahun 2015 bila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2011 APK SMP/MTs/SMPLB/paket B baru mencapai 92,96% dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 93,51%. Pada tahun 2013 juga mengalami kenaikan sebesar 10,01% dari tahun sebelumnya menjadi 103,52%. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2014 yang meningkat menjadi 104,76%. Peningkatan mencapai 105,01% pada tahun 2015 yang naik 0,25% dari tahun sebelumnya. Angka ini melampaui pencapaian target APK SMP/MTs/SMPLB/paket B Nasional sebesar 100,16%.

Begitu juga dengan capaian Indikator Kinerja APM SMP/MTs/SMPLB/paket B tahun 2015 bila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun

2011 persentase mencapai 75,43% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 80,90%. Pada tahun 2013 terjadi penurunan 0,15% menjadi 80,75% dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 81,12%. Pada tahun 2015 APM SMP/MTs/SMPLB/paket B kembali meningkat menjadi 81,15%. Angka ini melampaui pencapaian target APM SMP/MTs/SMPLB/paket B Nasional sebesar 78,43%.

### 3. APK dan APM SMA/SMK/MA/Paket C

Capaian Indikator Kinerja APK SMA/SMK/MA/paket C tahun 2015 bila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 APK SMA/SMK/MA/paket C baru mencapai 67,42% dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 86,75%. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan yang cukup tinggi sebesar 8,55% dari tahun sebelumnya. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2014 sebesar 1,34%. Pada tahun 2015 kenaikan mencapai 96,65%. Angka ini melampaui pencapaian target APK SMA/SMK/MA/paket C Nasional sebesar 78,19%. Begitu juga dengan capaian Indikator Kinerja APM SMA/SMK/MA/paket C tahun 2015 bila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2011 baru mencapai 50,34% dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 69,67%. Pada tahun 2013 juga terjadi peningkatan sebesar 2,29% menjadi 71,96% dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan tahun 2014 dengan persentase APM SMA/SMK/MA/paket C sebesar 73,08% juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 kenaikan APM SMA/SMK/MA/paket C meningkat menjadi 73,10%. Angka ini melampaui pencapaian target APM SMA/SMK/MA/paket C Nasional sebesar 58,25%.

## SIMPULAN

Dilihat dari sifat kegiatan dana dekonsentrasi yang non fisik, antara lain berupa: koordinasi, perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, maka pelaksanaan kegiatan alokasi dana dekonsentrasi belum sesuai dengan ketentuan mengenai sifat pendanaan dekonsentrasi. Hal tersebut karena dalam kegiatan dengan alokasi dana dekonsentrasi pada tahun 2011 dan 2012 masih terdapat kegiatan fisik seperti pembangunan gedung, pengadaan peralatan laboratorium, pembangunan SD-SMP satu atap, rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan gedung pendidikan yang masih terdapat pada kegiatan di lingkungan dinas pendidikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan juga pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada ketua STIE KBP Ibu Aminar Sutra Dewi, SE, M.Si, dan juga kepada ketua program studi akuntansi Bapak Muhammad Rivandi, SE, M.Si. Terimakasih juga saya ucapkan khususnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat atas semua kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armawaddina, M. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Flypaper Effect Analysis of District and City Regionally Spending in Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77–91.
- Basri, H. (2019). Analisis Kinerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. *Akuntansi*.
- Dewi, K. R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 7(1), 180–188.
- Fatimah, N. N. (2019). Pengaruh Pendaptan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.34209/equ.v21i1.628>
- Kusuma, W. D. (2017). Efektifitas Pengalihan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Ke Dana Alokasi Khusus. *Akuntansi*, (1), 29–52.
- Maharti, A. wahyu N. (n.d.). *Analisis Indeks Pendidikan dan Parameternya di Provinsi Maluku Utara*.
- Nugraha, N., & Amelia, T. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2011 – 2014. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 20(1), 51. <https://doi.org/10.31845/jwk.v20i1.122>
- Oktafia, A. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*, 72–83.
- Permana, L. H., & Purwanti, E. Y. (2013). Analisis Dana Dekonsentrasi Dan Dana Apbd Sektor Pendidikan Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Economics*, 2(1), 1–11.
- Ramadani, A. (2017). Analisis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Soppeng. *Akuntansi*, 4, 9–15.
- Runtuwene, S. (2019). *Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi pemerintahan dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi*. 7(71), 4504–4513.